

ABSTRAK

Nuraini Hudiya, 1168010207: Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus: Pengelolaan dan Penggunaan Kendaraan Dinas) Di Lingkungan Sekretariat Daerah Jawa Barat

Hakikatnya kendaraan dinas digunakan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya di surat pernyataan pertanggung jawaban atas kendaraan dinas tersebut. Yang kemudian jika jangka waktunya habis akan dikembalikan pada dinas itu kembali. Di lingkungan sekretariat daerah sempat terjadi kasus kehilangan kendaraan dinas, dimana kendaraan tersebut pernah digunakan oleh salah satu pejabat di pemerintah daerah provinsi Jawa Barat dan dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Perawatan dan hal lain yang diberikan negara untuk kendaraan tersebut diharapkan kendaraan tersebut dikembalikan dengan keadaan yang baik pula. Namun, pada kenyataannya beberapa kendaraan dinas yang dikembalikan mengalami beberapa masalah hingga mengalami kerusakan berat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi dalam peraturan pengelolaan kendaraan dinas, sumberdaya yang melaksanakan peraturan pengelolaan kendaraan dinas, disposisi dari mengimplementasikan peraturan pengelolaan kendaraan dinas dan struktur birokrasi dalam mengimplementasikan peraturan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Jawa Barat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III yang melihat keberhasilan kinerja implementasi kebijakan dari 4 (empat) dimensi, yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dilakukan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah sehingga mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna yaitu data yang sebenarnya sehingga memperoleh gambaran secara utuh. Dalam hal ini menggambarkan mengenai implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus: Pengelolaan dan Penggunaan Kendaraan Dinas) di Lingkungan Sekretariat Daerah Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan pengelolaan barang milik daerah sudah terlaksana tetapi belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari dua dimensi yang belum terlaksana dengan optimal, yaitu: (1) Komunikasi belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya komunikasi antara pihak pengelola dan pengguna kendaraan dinas dalam kelengkapan administrasi mutasi barang saat pemindahan tempat kerja. (2) Sumberdaya Dalam dimensi ini terdapat beberapa kendala seperti kelupaan dalam penggantian oli, pembayaran pajak, kehilangan unit kendaraan dinas dan biaya pemeliharaan yang melebihi batas standar yang membuat dimensi sumberdaya belum berjalan dengan optimal. Sedangkan, pelaksanaan aturan tersebut dilihat dari kedua dimensi lainnya, yaitu: (1) Disposisi, (2) Struktur Organisasi sudah terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Pengelolaan, Penggunaan, Kendaraan.

ABSTRACT

Nuraini Hudiya, 1168010207: Implementation of Regional Regulation Number 3 of 2019 Concerning The Management of Regional Property (Case Study: Management and Use of Official Vehicles) at The West Java Regional Secretariat.

In essence, the official vehicle is used according to the time period previously determined in the statement of responsibility for the official vehicle. Then, if the period is up, it will be returned to the service again. In the regional secretariat there was a case of losing an official vehicle, where the vehicle was once used by an official in the regional government of West Java province and was stolen by irresponsible persons. It is hoped that the maintenance and other things provided by the state for the vehicle will be returned in a good condition. However, in reality, some of the official vehicles returned were experiencing several problems, causing serious damage. This study aims to determine the communication in the official vehicle management regulations, the resources that implement the official vehicle management regulations, the disposition of implementing the official vehicle management regulations and the bureaucratic structure in implementing the official vehicle management regulations in the West Java Regional Secretariat.

The theory used in this study is the policy implementation theory from Edward III which sees the success of policy implementation performance from 4 (four) dimensions, namely: (1) Communication, (2) Resources, (3) Disposition, (4) Bureaucratic Structure.

This study uses a qualitative research method with a descriptive approach, which is carried out to examine the condition of natural objects in order to obtain in-depth and meaningful data, namely actual data so as to obtain a complete picture. In this case describes the implementation of Regional Regulation No. 3 of 2019 concerning Management of Regional Property (Case Study: Management and Use of Service Vehicles) in the West Java Regional Secretariat.

Based on the research results, it can be concluded that the implementation of regional property management regulations has been implemented but has not been optimal. This can be seen from two dimensions that have not been carried out optimally, namely: (1) Communication has not been going well due to the lack of communication between the manager and the official vehicle users in the completeness of administration of goods mutation when moving workplaces. (2) Resources In this dimension there are several obstacles such as forgetfulness in oil changes, tax payments, loss of official vehicle units and maintenance costs that exceed the standard limit which make the resource dimension not run optimally. Meanwhile, the implementation of these rules is seen from the other two dimensions, namely: (1) Disposition, (2) Organizational Structure has been carried out well.

Keywords: Management, Use, Vehicle.